

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah Desa Joketro**

Pada zaman dahulu ada seorang lelaki tua yang disegani oleh banyak orang. Tidak sedikit juga orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu (berguru). Orang ini dikenal memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga orang ini disebut sakti mandraguna. Lelaki sakti yang disegani khalayak umum tersebut bernama Marto Wiyono. Orang-orang biasa menyebutnya dengan panggilan “Mbah Marto Wiyono“. Mbah Marto Wiyono adalah orang yang babad (membuka hutan untuk perkampungan) suatu tempat yang kemudian bernama desa Joketro. Beliau juga yang menurunkan ilmu–ilmunya kepada murid–muridnya. Pada waktu itu merupakan masa peperangan melawan penjajah, sebagai akibat dari politik pemecah belah oleh penjajah menimbulkan adanya perebutan kekuasaan. antara pejuang-pejuang dan pengikut–pengikut Kyai Mageti dan pengikut Batoro Katong maka Mbah Marto Wiyono beserta pengikutnya membantu Batoro Katong.

Peperangan berlangsung di daerah Bulungan yaitu daerah antara desa Joketro dan desa Banyudono. Pada waktu peperangan berlangsung, Mbah Marto Wiyono terkena anak panah di daerah Sentono yang masih dalam wilayah desa Joketro. Beliau mbah Marto Wiyono akhirnya meninggal dunia kemudian dimakamkan di daerah sentono yang akhirnya sampai saat ini daerah

tersebut oleh masyarakat desa Joketro lebih dikenal dengan sebutan Punden Sentono.

Sekarang Punden Sentono tersebut menjadi daerah yang dikeramatkan atau dihormati oleh warga Joketro dan banyak dikunjungi masyarakat terutama pada bulan Muharam/Suro, sebagai tempat peninggalan sejarah bagi desa Joketro, dari Pemerintahan Desa sendiri apabila pada bulan Suro tersebut mengadakan Upacara Bersih Desa sebagai bentuk penghormatan bagi para pejuang atau pelaku sejarah bagi desa Joketro.

Pada saat peperangan dalam perebutan kekuasaan di daerah Bulungan banyak prajurit-prajurit dari kedua belah pihak yang berasal dari daerah-daerah lain yang merupakan bala bantuan dari kedua belah pihak, yang dalam bahasa jawa dikatakan sebagai prajurit "*Jok – Jekan Prajurit Daerah Liyo*".

Banyak prajurit yang lari/singgah di daerah selatan bulungan yang sekarang dikenal dengan Desa Pendem. Di daerah tersebut dirasa oleh prajurit-prajurit kurang merasa aman, maka para prajurit-prajurit tersebut meninggalkan Desa Pendem dan menuju arah Tenggara. Adapun dalam pelaksanaannya mereka melakukan strategi dengan cara semua senjata yang dipegangnya di simpan/ditinggalkan di Desa Pendem supaya dianggap sebagai masyarakat biasa. Para prajurit tersebut akhirnya singgah/sembunyi di suatu daerah yang mereka anggap aman, daerah aman tersebut yang akhirnya sampai saat ini dikenal dengan nama Joketro Yang mempunyai makna dalam bahasa jawa "*Ojo Ketoro*".

## 2. Sejarah Pemerintahan Desa Joketro

Sejarah kepemimpinan sebagai Kepala Desa di Desa Joketro sudah terbilang cukup lama yaitu dimulai sejak tahun 1904 yang dipimpin oleh Bapak Kasan Redjo sebagai Kepala Desa pertama. Adapun jajaran Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Joketro dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a. Kasan Redjo          | : 1904-1914    |
| b. Wongso Dikromo       | :1914-1920     |
| c. Karso Sentono        | :1920-1934     |
| d. Imam Dihardjo        | :1934-1950     |
| e. Marto Sentono Selung | :1950-1977     |
| f. Sarbiyanto           | :1977-1990     |
| g. Marjani              | :1990-2007     |
| h. Sarbiyanto           | :2007-2013     |
| i. Parno                | :2013-2019     |
| j. Marjoko              | :2019-Sekarang |

## 3. Kondisi Geografis Desa Joketro

Letak geografis suatu wilayah mempunyai peranan yang penting, hal ini dikarenakan dapat memberikan informasi-informasi mengenai keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang ada di wilayah tersebut.

Desa Joketro masuk pada wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dimana Kabupaten Magetan terletak dibawah kaki Gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara, karena itu Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan *Green Belt Lawu* atau lingkaran hijau Lawu.<sup>59</sup> Secara geografis, Desa Joketro berada pada 7.51976°S lintang selatan dan 111.46129° E/bujur timur dengan ketinggian antara 370 mdpl. Batas-batas wilayah Desa Joketro secara geografis adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pendem
- b. Sebelah Selatan : Desa Krajan
- c. Sebelah Barat : Desa Ngaglik
- d. Sebelah Timur : Desa Banjar Panjang

Desa Joketro merupakan sebuah nama desa yang memiliki empat dusun (pendukuhan) yaitu Dusun Ngasinan, Dusun Lebak, Dusun Joketro, dan Dusun Lempong. Keseluruhan penduduk Desa Joketro dapat dikelompokkan ke dalam 8 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif keseluruhan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Profil Kabupaten Magetan 2013

<sup>60</sup> Observasi Tanggal 24 September 2020

**Tabel : 4.1****Data RW Desa Joketro**

<b>No</b>	<b>RW</b>	<b>Ketua RW</b>
1	001	Miskun
2	002	Kasman
3	003	Rahayu Widodo
4	004	Wardi
5	005	Kadirun
6	006	Paeran/ Glendhoh
7	007	Radianto
8	008	Samud

Sumber : Web Desa Joketro

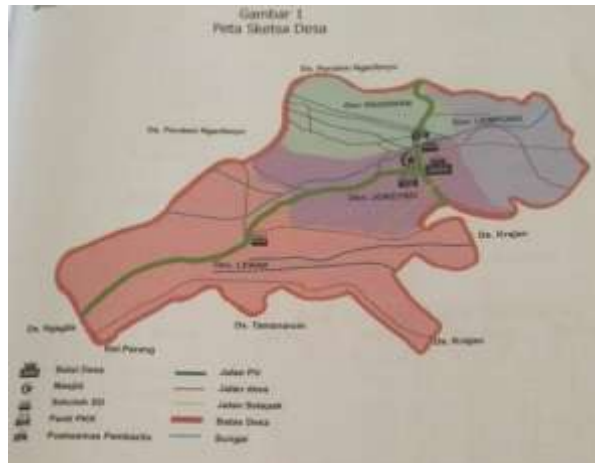
**Tabel 4.2****Data RT Desa Joketro**

<b>No</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>	<b>Ketua RT</b>	<b>Dusun</b>
1	001	001	Sarji	Joketro
2	002	001	Sugiyanto	Joketro
3	003	001	Marsiyati	Joketro
4	004	001	Paeran	Joketro
5	005	002	Sarbun	Joketro
6	006	002	Sardianto	Joketro
7	007	002	Joni Toblok	Joketro
8	008	003	Misran	Lempong

9	009	003	Bejo	Lempong
10	010	004	Pono	Lempong
11	011	004	Suyono	Lempong
12	012	005	Simu	Ngasinan
13	013	005	Warno	Ngasinan
14	014	006	Parman	Ngasinan
15	015	006	Sarkun	Ngasinan
16	016	007	Sutrisno	Lebak
17	017	007	Sarji	Lebak
18	018	007	Juwari	Lebak
19	019	008	Sudar	Lebak
20	020	008	Mirun	Lebak
21	021	008	Rimun	Lebak

Sumber : Web Desa Joketro

Desa Joketro memiliki luas wilayah 215,675 Ha yang mencakup perumahan, sawah, tanah pekarangan, dll. Desa Joketro merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Letak Desa Joketro termasuk paling utara diantara desa-desa yang lain yang berada diwilayah Kecamatan Parang. Jarak Desa Joketro ke Kecamatan Parang 7 km dengan waktu tempuh  $\pm 15$  menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak Desa Joketro ke Kabupaten Magetan adalah 6 km, dengan waktu tempuh  $\pm 12$  menit. Dan jarak Desa Joketro ke Ibu Kota Provinsi adaah 197 km. Jadi Desa Joketro merupakan desa yang begitu strategis, yang letaknya mudah dijangkau dari daerah manapun.

**Gambar : 4.1****Peta Desa Joketro**

#### 4. Kondisi Demografi Desa Joketro

Total jumlah penduduk di Desa Joketro yaitu 3.095 penduduk atau jiwa yang terdiri dari 874 kepala keluarga (KK). Perkembangan penduduk Desa Joketro dari tahun ke tahun selalu terdapat perubahan, tetapi perubahannya tidak begi signifikan. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Joketro dari tahun 2015-2019 berdasarkan buku profil Desa Joketro :

**Tabel: 4.3****Data Jumlah Penduduk Desa Joketro**

No	Tahun	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Kewarganegaraan	Jumlah Penduduk		
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2015	1255	868	WNI	1495	1660	3155
2	2016	1263	791	WNI	1477	1654	3131
3	2017	1268	876	WNI	1479	1659	3138
4	2018	1271	878	WNI	1463	1633	3096
5	2019	1283	874	WNI	1467	1628	3095

Tingkat pendidikan penduduk Desa Joketro masih didominasi pada tingkat pendidikan dasar yaitu SD, SMP, SMA. Hanya sebagian kecil penduduk yang mengenyam pendidikan pada tingkat sarjana. Tingkat pendidikan berpengaruh dengan pekerjaan penduduk Desa Joketro. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel : 4.4**

**Komposisi Penduduk Dari Tingkat Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Tahun 2020
1	Petani / Pekebun	2094
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15
3	TNI&POLRI	3
4	Pegawai Swasta	17
5	Pertukangan	9
6	Jasa	5

Sumber : Profil Desa Joketro

Dilihat dari tabel 4.4 diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Joketro bermata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari adalah petani / pekebun. Dalam hal pertanian, khususnya penanaman padi, penduduk Desa Joketro hanya dapat melakukan panen hasil pertanian padi satu kali dalam setahun dikarenakan tanah persawahannya adalah sawah hujan.

#### 5. Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa Joketro

Kondisi sosial masyarakat Desa Joketro sangat beragam, hubungan sosial antar masyarakat masih sangat kental. Pelestarian adat- istiadat desa juga masih sangat dilestarikan. Sehingga perlunya perhatian yang sangat khusus. Kondisi tersebut dapat dilihat masih adanya budaya-budaya kegotong-royongan



masyarakat untuk melestarikan sebuah pekerjaan, selain itu juga banyak organisasi di desa yang sifatnya hanya suka rela. Oleh sebab itu perhatian dari desa sangat diperlukan untuk relawan yang ada di desa sebagai pemacu mereka bekerja. Kegiatan yang ada di desa antara lain sebagai berikut :

**Tabel : 4.5**

**Data Kelembagaan Di Desa Joketro**

No	Kelembagaan Masyarakat	Anggota
1	Organisasi Perempuan (Fattayat, Al-Hidayah, Yasinan, dll)	160 orang
2	Organisasi PKK	30 orang
3	LPM	10 orang
4	BPD	1 lembaga
5	RW	8
6	RT	21
7	Organisasi Profesi	-
8	Sinoman	10 organisasi
9	Organisasi Pemuda	1 lembaga
10	Organisasi Bapak-bapak (Kelompok tani, HIPPA, dll)	14 lembaga
11	Kelompok Gotong-Royong (Rukun Kematian, dll)	24 lembaga

## 6. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan suatu hal yang utama di dalam suatu kinerja instansi maupun perusahaan. Visi merupakan gambaran umum tentang sesuatu hal yang akan dicapai di masa depan (*future*) yang realistis dan ingin

diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi visi adalah sebuah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga di masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi tersebut. Misi ini mencakup filosofi dari para pegambil keputusan yang menyatakan citra yang ingin diproyeksi dan mencerminkan konsep diri dari suatu instansi ataupun perusahaan. Adapun visi misi dari kantor desa Joketro yaitu sebagai berikut :

VISI :

**“Bersama Kita Membangun Desa Joketro”**

MISI :

**1) Memperbaiki Management Pemerintahan Desa di Segala Bidang.**

- a. Mengatur/ inventarisir administrasi arsip dan aset-aset desa secara lengkap.
- b. Meningkatkan skill/ keahlian aparatur desa sesuai dengan bidang yang diembannya.
- c. Mengatur anggaran dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas.
- d. Meng-aktifkan dan bekerja yang solid dengan instrumen-instrumen birokrasi desa.
- e. Membangun/ meningkatkan kredibilitas dan transparansi birokrasi dan masyarakat.
- f. Mendengarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## **2) Memperdayakan dan Meningkatkan Kualitas Generasi Muda.**

- a. Membina dan memfasilitasi kreatifitas generasi muda pada peranannya dalam pembangunan desa.
- b. Mensupport skill/ keahlian generasi muda di era teknologi dan modernisasi di segala bidang.
- c. Meningkatkan dan membekali kepribadian generasi muda yang berbudaya da beragama.
- d. Menjalin kerjasama dengan dinas terkait dalam program parenting untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas.
- e. Menciptakan internetisasi di setiap dusun sebagai ruang publik, sebagai media informasi, pendidikan bisnis.

## **3) Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan.**

- a. Memfasilitasi sinergisitas petani/ kelompok tani dengan dinas terkait maupun perusahaan sarana produksi pertanian, serta meningkatkan fasilitas fisik penunjang budidaya pertanian.
- b. Membina dan mengembangkan sektor peternakan, dari usaha sampingan menjadi usaha pokok yang menghasilkan.
- c. Memfasilitasi dan membina swasta, seperti berkah pasir, tukang, dan sebagainya guna peningkatan ekonomi.
- d. Menciptakan dan mengelola sumber daya/ potensi desa yang ada menjadi desa wisata guna peningkatan perekonomian.
- e. Memfasilitasi serta membina Usaha Masyarakat Kecil Menengah untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

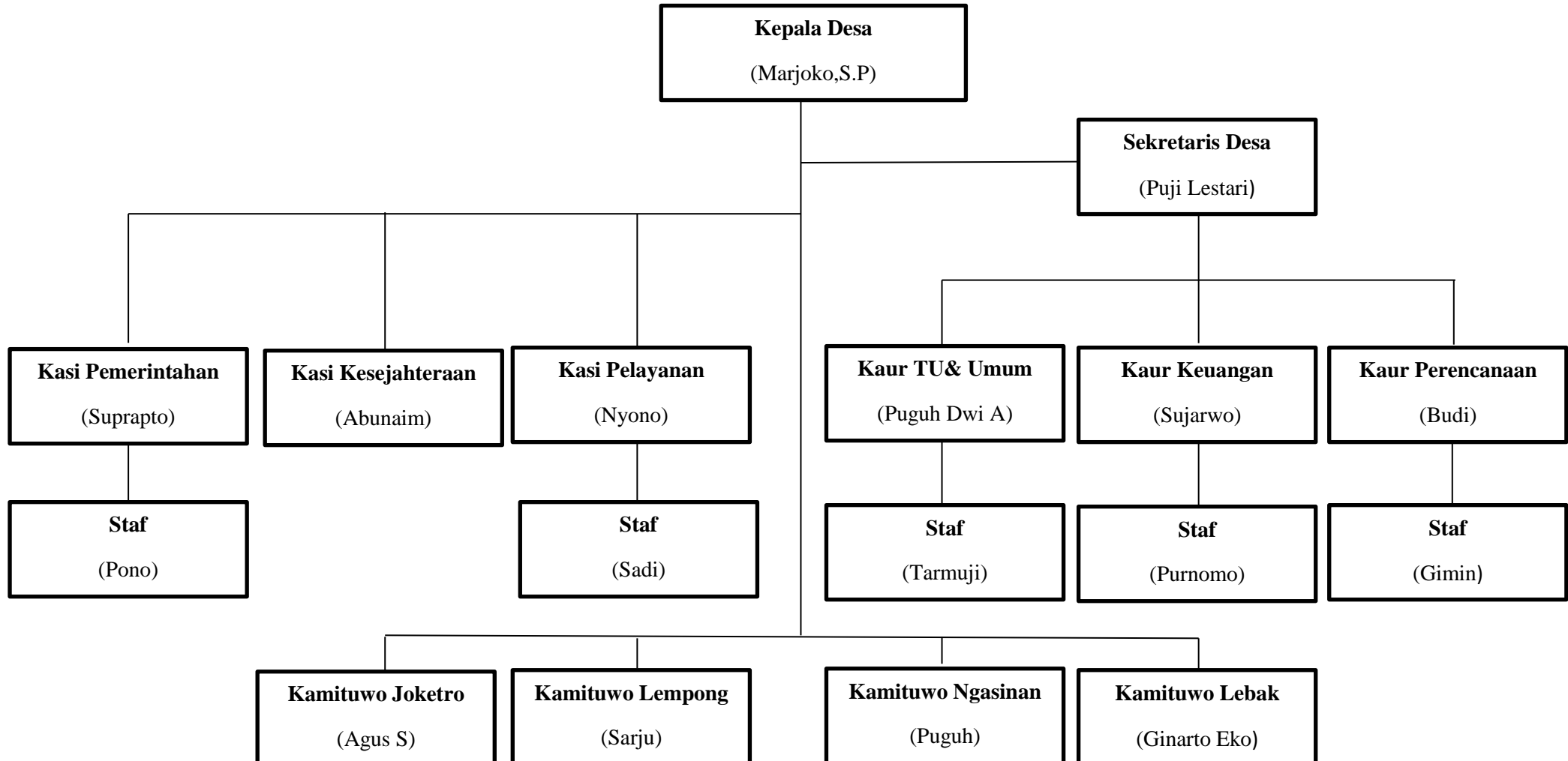
- f. Membina dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah peningkatan ekonomi masyarakat.
- g. Menjalin kerjasama dengan semua instansi pemerintah sehingga tercipta Desa Mandiri,

## 7. Struktur Organisasi

Di dalam sebuah instansi lembaga pemerintahan, struktur organisasi sangat begitu penting. Tujuan penyusunan struktur organisasi merupakan sebuah langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi merupakan langkah yang sudah direncanakan dalam suatu perusahaan atau lembaga instansi pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Struktur organisasi (*organizational structure*) merupakan identifikasi tanggungjawab bagi masing-masing posisi jabatan hubungan diantara posisi-posisi tersebut. Adapun struktur organisasi pada pemerintahan Desa Joretro adalah sebagai berikut:

Gambar : 4.2

## Struktur Organisasi Desa Joketro



### **Tupoksi Kades dan Parades :**

#### **1. Kepala Desa**

Secara umum tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b. Melaksanakan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Menyenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- d. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- f. Menetapkan Peraturan Desa
- g. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- h. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
- i. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
- j. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- k. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- l. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- m. Membina kehidupan masyarakat Desa
- n. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- o. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- p. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- q. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- r. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- s. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- t. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- u. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- v. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Dalam membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penata administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, investasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.



- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa.

### 3. Kaur Tata Usaha & Umum

Kepala urusan umum dan perencanaan menpuntai tugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, umum dan perencananaan. Adapun fungsi Kaur Umum dan Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Penataan adminitrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor umum.
- c. Mengelola buku administrasi umum model A,A2, A3,A4, A5,A6,A7, A8, dan A9.
- d. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Menginventarisir data-data rangka pembangnan
- f. Melakukan monitoring
- g. Evaluasi program
- h. Penyusunan laporan

- i. Mengelola buku administrasi keuangan model C1, C2, dan buku administrasi pembangunan model D1.
- j. Sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan bidangnya.

#### 4. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan. Adapun fungsi Kaur Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus administrasi keuangan.
- b. Sebagai administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Verifikasi administrasi keuangan.
- d. Melakukan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- e. Mengelola buku administrasi keuangan model C3, C4, C5, dan C6.
- f. Melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 5. Kaur Perencanaan

Dalam membantu kepala desa, kaur perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidangnya.
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

#### 6. Kasi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan dalam membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- b. Menyusun rancangan regulasi desa.
- c. Pembinaan masalah pertanahan.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
- f. Kependudukan.
- g. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- h. Penataan dan pengelolaan profil desa.
- i. Mengelola buku administrasi kependudukan model B1, B2, B3, B4, dan B5.
- j. Sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai bidang tugasnya.

#### 7. Kasi Kesejahteraan

Tugas dari Kaur Seksi Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
- b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- c. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- d. Mengelola buku administrasi pembangunan model 2 dan model 3.
- e. Sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 8. Kasi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional pemerintah. kepala seksi pelayanan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- c. Mengelola buku administrasi pembangunan model 4.
- d. Sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan bidang tugasnya.

### **B. Temuan Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Joketro**

Berikut Hasil wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa Joketro mengenai gambaran umum pengelolaan sistem keuangan di Desa Joketro adalah sebagai berikut:

Bagaimana gambaran umum pengelolaan keuangan di Desa Joketro ?

Ibu Puji Lestari menjawab :

“Pada awal perencanaan kita (Desa Joketro) merencanakan RPJMDes dalam jangka waktu 6 tahun. Selama 6 tahun itu kegiatannya apa saja itu sudah direncanakan. Jadi sudah membuat rencana kegiatan selama 6 tahun, ya sebanyak-banyaknya. Ya mungkin tidak semuanya dilaksanakan, tapi setidaknya kita sudah merencanakan selama 6 tahun, dalam jangka waktu 6 tahun. Nah kemudian nanti setiap tahunnya kita ada lagi yang namanya RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Kalau RKP itu jangkanya satu tahun”<sup>61</sup>

Hal ini diperkuat oleh narasumber lain yaitu Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Desa Joketro yaitu sebagai berikut :

“Mekanismenya pertama, kita sebelum ada istilahnya RPJMDES. Itu merupakan visi misi dari kepala desa terpilih. Nanti RPJMDES itu kan 6 tahun. Setelah itu ditarik garis besar dalam satu tahun pertama yang namanya RKP, yang tahunan. Dari RKP ditarik lagi ke APBDES”.<sup>62</sup>

Apa saja peraturan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Joketro?

Kemudian Ibu Puji Lestari mengatakan sebagai berikut :

“Pedoman dalam mengelola keuangan yang pertama kan kalau ada Perpres, kalau ngga ada Perpres berarti turunannya ke PP, kalau ngga ada PP (Peraturan Pemerintah) berarti pakainya Permendagri atau Permendes (Peraturan Menteri Perdesaan kalau Permendagri itu Peraturan Menteri Dalam Negeri). Lalu diturunkan lagi, diturunkan lagi itu ke Perbup (Peraturan Bupati). Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Di desa dibuat lagi peraturannya menjadi Perdes.”<sup>63</sup>

Kemudian timbul pertanyaan lagi yaitu bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di desa Joketro ?

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.12

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Joketro, pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.10

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.12

“Sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di Desa Jokoetro, dalam pelaksanaannya sudah menggunakan sistem aplikasi SISKEUDES”.<sup>64</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Desa Joketro yang mengatakan sebagai berikut :

“Kalau pakai sistem kan enak, inputnya juga enak. Kalau di Parang mulai tahun 2017 sudah ada. Siskeudes kan Parang paling dulu daripada Kecamatan lain”.<sup>65</sup>

Gambaran umum pengelolaan keuangan di Desa Joketro pada awalnya membuat perencanaan awal selama 6 (enam) tahun yaitu berupa RPJMDES. Ini memuat rencana-rencana kegiatan. Kemudian setelah RPJMDES dibuat lagi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) selama satu tahun. Dari kedua poin tersebut yang terakhir membuat APBDES, yang nantinya akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang telah direncanakan.

Dalam proses pengelolaan keuangan, Desa Joketro sudah memakai aplikasi atau yang biasa disebut dengan Sistem Keuangan Desa. Desa Joketro menempati peringkat 5 (lima) di Kabupaten Magetan, dan peringkat 1 (satu) di Kecamatan Parang. Sehingga banyak desa di Kecamatan Parang yang belajar mengenai Siskeudes di Desa Joketro. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa, maka dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu juga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Joketro, pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.10

## 2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten

### Magetan

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Desa Joketro mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro. Dengan ini peneliti menanyakan.

Apa yang dimaksud dengan Dana Desa ?

Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Desa Joketro menjawab :

“Dana desa merupakan sumber dana yang ditransfer dari pusat kepada daerah (desa) yang digunakan untuk keperluan-keperluan desa, seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat”.<sup>66</sup>

Kemudian timbul pertanyaan lagi yaitu “di Desa Joketro, Dana Desa itu digunakan untuk apa saja?”

Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa Joketro menjawab :

“Untuk dana desa sendiri itu penggunaannya untuk apa, kan ada batasan-batasannya. Prioritas penggunaan dana desa. untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, untuk kegiatan pendidikan, kesehatan itu pakainya dana desa. kalau untuk pemerintahan, anggaran di desa itu ada 5 bidang, yang bidang pemerintahan itu ada gaji, pembelian ATK itu tidak boleh memakai dana desa, pakainya alokasi dana desa atau dari sumber lain. Terus yang kedua itu bidang pembangunan, nanti ada sub bidang-bidangnya juga, misalkan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pembangunan fisik itu pakainya juga dari dana desa, harus dana desa. yang ketiga itu bidang pembinaan, bidang pembinaan itu biasanya kegiatan adat, kegiatan PHBI/PHBN, acara suran, karang taruna, itu boleh pakai dana desa tapi tidak boleh banyak-banyak. Tidak boleh melebihi bidang pemerintahan dan pembangunan. Terus bidang yang keempat itu bidang pemberdayaan itu PKK, terus pelatihan-pelatihan itu boleh pakai dana desa. Terus yang selanjutnya itu bidang tak terduga, biasanya kan bidang tak terduga itu kayak ada bencana. Itu boleh pakai dana desa”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Joketro, pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.10

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.30

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lagi mengenai tahap penyaluran dana desa yaitu sebagai berikut :

Bagaimana penyaluran Dana Desa di Desa Joketro ?

Ibu Puji Lestari menjawab :

“Penyaluran dana desa itu dilakukan pada tiga tahap, tahap pertama sebesar 40% di bulan April, tahap kedua 40% di bulan Agustus, dan yang terakhir yaitu tahap ketiga sebesar 20% pada bulan Oktober”.<sup>68</sup>

Adapun proses pengelolaan dana desa yaitu adanya tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, antara lain sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Joketro

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa Joketro mengenai tahap perencanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Joketro adalah sebagai berikut :

Bagaimana tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan di Desa Joketro?

“Pada awal perencanaan kita (Desa Joketro) merencanakan RPJMDes dalam jangka waktu 6 tahun. Selama 6 tahun itu kegiatannya apa saja itu sudah direncanakan. Jadi sudah membuat rencana kegiatan selama 6 tahun, ya sebanyak-banyaknya. Ya mungkin tidak semuanya dilaksanakan, tapi setidaknya kita sudah merencanakan selama 6 tahun, dalam jangka waktu 6 tahun. Nah kemudian nanti setiap tahunnya kita ada lagi yang namanya RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Kalau RKP itu jangkanya satu tahun. Misalnya kemarin bulan bulan Agustus sudah RKP untuk tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu sudah direncanakan di tahun 2020. Setelah RKP, diakhir tahun 2020 ini kita menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk tahun 2021. Nah, jadi dari RPJM disempitkan ke RKP terus disempitkan lagi menjadi APBDes. Pada APBDes ini kegiatannya sudah pasti dilaksanakan di 2021, tapi kalau yang RKP ada beberapa yang tidak dilaksanakan.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*, Ibu Puji Lestari



Dari hasil wawancara disini dapat diketahui bahwa pada saat awal perencanaan dibuat RPJMDES (Rencana Pembangunan Menengah Desa). Rencana ini dibuat dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam RPJMDES sudah dibuat rencana kegiatan sebanyak mungkin, ini merupakan salah satu wujud aspirasi masyarakat dalam prinsip transparansi yang menyalurkan aspirasinya untuk rencana kegiatan pemerintah desa melalui musyawarah desa (musdes).

Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Juwari selaku ketua RT 18 di desa Joketro yang mengatakan bahwa:

“Iya mbak, saya diajak dalam musyawarah desa yang membahas tentang rencana-rencana yang akan dilakukan. Misalnya, rapat untuk pembangunan jalan”<sup>70</sup>

Setelah dibuat RPJMDES, maka dilakukan penyempitan atau pemilahan rencana yang akan dilakukan yaitu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Dari sini dapat dilihat bahwa dari sekian banyak rencana dalam RPJMDES dipilah mana yang lebih diprioritaskan untuk direalisasikan rencana untuk pembangunan desa. RKP ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah dilakukan RKP, yang terakhir yaitu desa membuat APBDES. Ini merupakan rencana kegiatan yang sudah fiks atau akan dilaksanakan pada periode yang telah ditetapkan. APBDES ini harus disetujui oleh BPD, yang dilakukan pada saat kegiatan musyawarah desa (musdes).

Hal ini diperkuat oleh narasumber, yaitu BPD Desa Joketro yang mengatakan bahwa :

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Juwari selaku ketua RT 18 pada Selasa, 20-10-2020 pukul 19.15

“Sebelum semua itu disetujui disitu kan ada persetujuan BPD. Musdes-musdes itu penentunya BPD. Kalau musdes itu ada keputusan Kepala Desa, disitu berkaitan dengan BPD”<sup>71</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Joketro

Di dalam pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Joketro, diterapkan berdasarkan prioritas penggunaan dana Desa tahun berjalan. Tahap pelaksanaan yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan di APBDes. Di Desa Joketro dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem aplikasi online, atau SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dengan sistem ini dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan atau pencairan dana di Desa Joketro. Hal ini diperkuat oleh narasumber atau informan yang mengatakan bahwa :

“Setelah perencanaan kan nanti kan pelaksanaannya sesuai itu ya yang sudah di APBDes itu. Karena kita sudah pakai sistem aplikasi SISKEUDES itu sudah mempermudah untuk pencairan dana”<sup>72</sup>

Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa dapat digambarkan dengan siklus sebagai berikut:

**Gambar : 4.3**

**Siklus Pelaksanaan Keuangan Desa**



<sup>71</sup> Wawancara dengan BPD Desa Joketro pada Selasa, 20-10-2020 pukul 18.45

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09.45

- 1) Tahap pertama, pelaksanaan keuangan desa adalah pelaksanaan APB Desa yang meliputi kegiatan : sosialisasi Perdes APB Desa, penyusunan DPA/RAB, pelaksanaan penerimaan, pelaksanaan belanja.
- 2) Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan yang meliputi: mekanisme pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, permintaan pendanaan, dan pencairan.
- 3) Tahap ketiga, perubahan APB Desa yang meliputi kegiatan penyusunan rancangan Perubahan APB Desa, Penetapan Perubahan APB Desa dan sosialisasi peraturan tentang Perubahan APB Desa.

Dalam pencairan dana dari dana transfer biasanya dalam satu (1) tahun ada tiga (3) tahap. *Tahap pertama*, Dana Desa (DD) sebesar 40% antara bulan Maret-April. *Tahap kedua*, sebesar 40% pada bulan Agustus. *Tahap ketiga*, sebesar 20% cair antara bulan September –Oktober.

Hal ini diperkuat oleh informan atau narasumber yang mengatakan bahwa:

“Nah, untuk dari dana itu sendiri, dari transfer biasanya satu tahun ada tiga (3) tahap. Nah, tahap pertama itu dana desa tahun ini adalah 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Untuk tahap pertama itu biasanya antara bulan Maret- April. Yang tahap dua nanti cair pada bulan Agustus. Tahap tiga cair di bulan September kalo tidak Oktober. Ya ngga pasti, tapi perkiraan itu.”<sup>73</sup>

Dalam tahap pelaksanaan, jika akan melakukan kegiatan pada aplikasi Siskeudes maka akan dibuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran). SPP ini gunanya untuk mencairkan dana yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai

---

<sup>73</sup> *Ibid*, wawancara dengan Ibu Puji Lestari

dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar dan kurang dari yang tertera dalam DPA. Di dalam pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang nantinya akan dicairkan.

Hal ini diperkuat oleh narasumber yaitu Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa Joketro yang mengatakan bahwa :

“Jadi kalau kita mau melaksanakan kegiatan,kita ambil dulu itu namanya kalau di Siskeudes di aplikasi itu kita membuat SPP dulu. Kita mau melaksanakan kegiatan apa, totalnya berapa. Terus berarti kita pencairan.”<sup>74</sup>

c. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Joketro

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penata usahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa berupa :

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Pembantu Pajak
- c) Buku Bank

Hal ini sesuai dengan argumen yang telah disampaikan oleh Ibu Puji Lestari yang mengatakan bahwa :

“Penatausaannya itu ada banyak sekali mbak. Setelah pelaksanaan itu kan ada penata usahaan, seperti buku pembantu pajak, buku pembantu panjar,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09. 30

ada juga buku kas umum, ada kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan, ada SSP, buku pembantu bank. Itu penatausahaannya seperti itu.”<sup>75</sup>

Hasil dari penelitian pada pemerintah Desa Joketro mengenai tahap penatausahaan adalah lebih menitikberatkan pada sistem aplikasi secara online yaitu menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan juga tentang buku pembantu serta pelaporan yang didukung dengan bukti-bukti transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan.

Di dalam penatausahaan terdapat 3 (tiga) buku pembantu yang dibuat oleh Kaur Keuangan yang terdiri atas :

a. Buku pembantu bank

yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku pembantu pajak

yaitu catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku pembantu panjar

yaitu catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Joketro

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa Joketro mengenai tahap pelaporan pada pengelolaan keuangan desa. Peneliti menanyakan sebagai berikut:

Apa saja laporan yang dibuat oleh pemerintah desa di dalam tahap pelaporan ?

Ibu Puji Lestari menjawab :

“Pelaporannya itu berupa laporan realisasi, satu kali itu ada dua. Tengah semester sama realisasi pada semester akhir.”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09. 30

Tatacara dalam tahap pelaporan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/ Walikota.
- 2) Selanjutnya, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggi dan Transmigrasi.

Pada tahap pelaporan disini Desa Joketro sudah membuat pelaporan dengan baik. Selain itu juga sudah menggunakan sistem aplikasi dalam proses pencatatan, sehingga mempermudah juga dalam pelaporan. Dalam pelaporan juga harus disertai bukti-bukti yang mendukung atas semua proses dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

e. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Joketro

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan dalam pemerintahan desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota, BPD, pemerintah desa juga mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat (yang perlu di publish) melalui media informasi seperti web desa, facebook, instagram, papan pengumuman, dll. Hal ini diperkuat oleh narasumber atau informan yang mengatakan bahwa :

“Laporan yang dibuat oleh pemerintahan desa untuk BPD yaitu LKPD, yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban yang di musdeskan pada setiap akhir tahun”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09. 30

<sup>77</sup>Wawancara dengan BPD Desa Joketro pada Selasa,20-10-2020 pukul 18.45

Laporan ini pada dasarnya merupakan laporan realisasi pelaksanaan dari APBDes yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota setelah tahun anggaran berakhir yaitu pada 31 Desember di setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban ini dilakukan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini diperkuat oleh narasumber atau informan yang mengatakan bahwa :

“Pertanggungjawaban itu kita ke membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati nanti melalui Camat dan pertanggungjawaban kepada BPD.”<sup>78</sup>

Dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota. Laporan pertanggungjawaban ini berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi atas pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam tahap

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Puji Lestari selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Joketro, pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 09. 30

pertanggungjawaban Desa Joketro sudah menerapkan prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan prinsip transparansi (keterbukaan).

Hal ini dapat diketahui pada saat musyawarah desa (musdes) juga dihadiri oleh sebagian masyarakat dan juga BPD yang menjadi perwakilan dalam rapat musyawarah desa (musdes) dalam penyusunan dan penetapan RKPDES.

Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber atau informan yang menyatakan bahwa :

“Pertanggungjawabannya kita setiap tahun kan pasti ada laporan semester pertama, itu dibulan juli awal, kita sudah masuk dalam laporan pertanggungjawaban semester pertama. Setelah itu nanti ada laporan akhir tahun, namanya laporan realisasi APBDES. Itu total awal tahun sampai akhir tahun.”<sup>79</sup>

### 3. Implementasi Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Di Desa Joketro

#### a. Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa Jokero

Desa Joketro merupakan desa yang sudah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Dimana prinsip akuntabilitas merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah-kaidah yang terkandung di dalam prinsip *good governance* adalah partisipasi, transparan, dan tanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip pertanggungjawaban. Dimana setiap hal yang dilakukan, harus ada lembar bukti perincian dari anggaran yang telah digunakan pada kegiatan tersebut.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Joketro, pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.10



Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Joketro tingkat akuntabilitasnya sudah cukup baik. Implementasi dari prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang ada di pemerintahan Desa Joketro yaitu pada saat akhir tahun dibuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada BPD dan Bupati. Laporan resmi yang dibuat oleh pihak pemerintah Desa Joketro yang diberikan kepada BPD yaitu berupa laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Laporan ini disampaikan pada akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sedangkan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) dibuat oleh pemerintah Desa Joketro untuk disampaikan kepada Bupati. Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber atau informan yang mengatakan bahwa :

“Kita juga ada kok mbak laporan resmi kepada BPD dan Bupati, yaitu laporan LKPJ dan laporan LPPD. Setiap tahun kita musdeskan. Nanti setelah musdes, laporan itu yang satu kita kasihkan ke BPD, dan yang satunya lagi ke Bupati”<sup>80</sup>

Ini merupakan salah satu implementasi asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Joketro. Tujuan laporan tersebut adalah sebagai bahan evaluasi dari serangkaian program kerja atas pelaksanaan APBDES dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan LKPJ dan LPPD merupakan laporan pertanggungjawaban kepala desa yang wajib dan rutin, yang berisikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dan APDES yaitu kegiatan yang sudah dikerjakan / direalisasikan, kegiatan yang belum terealisasi atau tercapai dalam tahun anggaran, berapa

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

anggaran kegiatan dan berapa realisasi anggaran yang sudah dicapai pada satu periode anggaran. Itu semua disusun dan dilaporkan melalui dokumen LKPI dan LLP yang nantinya akan disampaikan kepada BPD dan Bupati/ Walikota.

b. Implementasi Asas Transparansi dalam Pemerintahan Desa Joketro

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan, dimana masyarakat atau pun pihak lain dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pemerintah Desa. Dari hasil wawancara dengan pihak perangkat desa, bahwa desa Joketro sudah menerapkan prinsip transparansi. Dimana dalam tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi.

Wujud transparansi yang dilakukan oleh Desa Joketro pada tahap perencanaan yaitu pada saat proses perencanaan APBDES pada musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa. Pada saat musyawarah desa ini, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai usulan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berjalan. Setiap keputusan yang diambil dari musyawarah desa tersebut harus mendapat persetujuan BPD, karena BPD disini merupakan salah satu penentu jalannya kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan musyawarah desa (musdes), masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi kegiatan yang akan dilakukan.

Hal ini diperkuat oleh salah satu narasumber atau informan yaitu ketua RT 18 Bapak Juwari yang mengatakan bahwa :

“Oo iya, dalam musdes memang ada beberapa perwakilan masyarakat mbak. Disitu kami diharapkan dapat memberikan pilihan atau rencana kegiatan yang akan dilakukan”<sup>81</sup>

Sedangkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, implementasi asas transparansi yaitu dengan ada media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau pun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai tata pemerintahan Desa Joketro. Selain dari media sosial, ada juga papan informasi yang dipasang di kantor Desa Joketro. Dari situ masyarakat bisa mengetahui secara langsung informasi yang disajikan oleh pemerintah desa Joketro. Itu semua wujud transparansi atau keterbukaan pemerintah Desa Joketro demi terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa :

“Dalam mewujudkan proses transparansi Pemerintah Desa Joketro setiap ada musdes, musdes itu musyawarah desa realisasi anggaran baik itu semester pertama, terus laporan akhir juga APBDES, perubahan semua dipublikasikan di media di facebook, di instagrram juga ada, juga dipasang banner-banner di papan informasi desa, seperti di depan. Setiap musdes hasilnya apa itu selalu dipublikasikan. Itu wujud transparansi kita (Desa Joketro)”<sup>82</sup>

Kemudian timbul pertanyaan yaitu :

Bagaimana implemetasi transparansi dari segi akuntansi ?

Bapak Sujarwo, selaku kaur keuangan menjawab :

“Begini mbak, akuntansi itu kan keuangan ya kaitannya. Transparansi masalah keterbukaan informasi. Jadi masyarakat harus tahu perincian atau pelaporan anggaran dana yang dikeluarkan. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Juwari selaku ketua RT 18 pada Selasa, 20-10-2020 pukul 19.19

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Joketro, pada Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 09.15

<sup>83</sup> Ibid.,